



Peninjauan TMMD Kodim Yogya di Kemantren Wirobrajan Yogya.

KR-Istimewa

## Waaster Kasad Kunjungi TMMD Kodim Yogya

YOGYA (KR) - Waaster Kasad Bidang Perencanaan dan Kemampuan Teritorial Brigien TNI Sugiono meninjau pelaksanaan Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-111 Kodim 0734/Kota Yogyakarta di Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta, Rabu (24/6).

"Kunjungan ini sebagai bentuk pengawasan dan evaluasi pelaksanaan TMMD. Dari hasil penilaian di lapangan pelaksanaan program TMMD Kodim 0734/Kota Yogyakarta sudah memenuhi kelayakan dan dibutuhkan masyarakat," ucap Waaster.

Peninjauan didampingi Data Staf Paban 1/Sterad Letkol Arm Budi Wahyono, Danrem 072/Pmungkas Brigien TNI Ibnu Bintang Setiawan SIP MM, Kasiter Kasrem Kolonel Inf Teguh Wiyono, Dandim 0734/Kota Yogyakarta Letkol Inf Erwin Ekagita Yuana SOP MSi, Waaster Kasdam IV/Diponegoro Letkol Kav Henry Rudi

Napitupulu, serta Bati Ops Bakti TNI Sterdam IV/Diponegoro.

Peninjauan hasil sasaran fisik TMMD dan bertatap muka dengan masyarakat di lingkungan setempat. Di Posko TMMD ada kegiatan donor darah sebagai salah satu kegiatan Non Fisik. Bahkan saat meninjau pembangunan Talut, Waaster Kasad mendapat sambutan masyarakat dan pemerintah setempat.

"Secara keseluruhan pelaksanaan TMMD Reg Ke-111 ada 50 tempat di seluruh Indonesia yang ada di 15 Kodam dan yang terbagi di beberapa Kodim dari Sabang sampai Merauke," jelasnya.

Sebelumnya peninjauan dilakukan Ketua Tim Pengawas dan Evaluasi (Wasev) dari Inspektorat Kodam (Itadam) IV/Diponegoro Kolonel Inf Suprpto, Selasa (22/6) pagi. "Harapannya 30 hari gelaran TMMD program bisa selesai semua," tegasnya. (Vin)-f

## KPID - KUNDHA KABUDAYAAN DIY

### Dukung Pemenuhan 10 Persen Konten Lokal



KR-Istimewa

Audiensi KPID DIY ke Dinas Kebudayaan DIY.

YOGYA (KR) - Guna mengakomodir amanat Perda DIY No 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penyiaran terkait pemenuhan 10 persen konten lokal bagi Lembaga Penyiaran (LP), Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DIY menggandeng Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayaan) DIY untuk merealisasikannya.

"Jelas tertuang dalam Perda DIY tentang Penyelenggaraan Penyiaran tersebut terkait keharusan mengalokasikan 10 persen waktu siaran untuk menyiarkan konten lokal," jelas Koordinator Bidang

Pengelolaan Struktur dan Sistem Siaran KPID DIY Yohanes Suyanto saat silaturahmi dengan Plt Kepala Dinas Kebudayaan DIY Aris Eko Nugroho, Rabu (23/6).

Turut hadir komisioner lain, Hazwan Iskandar Jaya, Febriyanto dan Noviaty Roficoh. Sementara itu, Aris Eko Nugroho didampingi Sekretaris Disbud DIY Cahyo Widayat serta sejumlah staf lain.

Ditambahkan Yohanes Suyanto, pihaknya selama ini sudah menjalin komunikasi dengan lembaga penyiaran di DIY agar dapat memenuhi amanat Perda tersebut.

Hanya saja menurut Yanto, mereka beralasan kesulitan produksi konten lokal, apalagi di tengah pandemi ini.

"Ketika kami sudah fasilitasi, sehingga harapannya tidak ada lagi alasan. Dengan begitu kami akan lebih mudah untuk menegur jika memang tidak terpenuhi kuota 10 persen tersebut," lanjutnya.

Sementara Plt Dinas Kebudayaan DIY Aris Eko Nugroho menyambut baik upaya kerjasama ini. Pihaknya mendukung penuh upaya untuk meneguhkan keistimewaan di DIY, khususnya melalui publikasi di lembaga penyiaran.

"Tentu saja harus ada kesepakatan dan tindak lanjut. Mengenai teknisnya seperti apa, bisa dikomunikasikan lebih lanjut. Pasti kami mendukung penuh segala upaya untuk membunikan keistimewaan serta menyebarluaskan informasi terkait dana keistimewaan (Danais)," ucap Aris. (Feb)-f

## PENGGUNAAN WAJIB DILAPORKAN AKHIR TAHUN

# Banpol Dikucurkan, Masuk Rekening Partai

YOGYA (KR) - Bantuan keuangan bagi partai politik atau banpol mulai dikucurkan Pemkot Yogya. Proses pencairannya tidak diberikan secara tunai melainkan ditransfer ke rekening tiap parpol yang memiliki kursi di lembaga dewan.

Setelah proses pencairan, maka dalam waktu dekat akan dilakukan koordinasi terkait pelaksanaan program melalui dana banpol. "Dana bantuan langsung masuk ke rekening setiap partai politik dan selanjutnya tinggal koordinasi untuk pelaksanaannya. Nantinya parpol wajib menyampaikan laporan penggunaan dana pada akhir tahun," jelas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Yogya Budi Santosa, Rabu (23/6).

Total ada delapan partai politik yang memiliki hak untuk menerima banpol. Masing-masing ialah PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, PKS, PAN, Partai NasDem, PPP, dan Partai Demokrat. Total anggaran yang dialokasikan untuk bantuan keuangan partai politik pada tahun ini tetap sama seperti tahun sebelumnya yaitu sekitar Rp 770 juta. Hal ini karena ti-

tidak ada perubahan terhadap besaran hibah bantuan yang diterima parpol.

Budi menjelaskan, pemberian bantuan keuangan semata-mata didasarkan pada jumlah suara yang berhasil diraih setiap partai politik dalam Pemilu 2019. Nilai hibah untuk setiap suara adalah Rp 3.446. Namun demikian terdapat perbedaan dalam pengelolaan banpol pada tahun ini yaitu diizinkan digunakan untuk mendukung penanganan pandemi Covid-19, namun tetap dikaitkan dengan fungsi utama pemberian hibah bantuan keuangan partai politik. "Penggunaan untuk penanganan Covid-19 tetap bisa dikaitkan untuk kebutuhan administrasi dan pendidikan politik. Misalnya penyediaan alat pelindung diri di sekretariat partai dengan pengadaan masker atau hand sanitizer," tandasnya.

Sedangkan untuk kebutuhan pendidikan politik, lanjut Budi, juga bisa dikaitkan dengan penyediaan fasilitas pendukung protokol kesehatan dalam sebuah pertemuan. "Sebelumnya setiap parpol juga sudah diminta melakukan revisi terhadap proposal program penggunaan bantuan keuangan tersebut agar bisa dikaitkan dengan penanganan Covid-19," jelasnya.

Pencairan banpol tersebut sedianya ditargetkan dapat dilakukan pada April lalu. Namun karena ada berbagai perubahan aturan termasuk pengelolaan dana hibah, maka dana baru bisa dicairkan Juni. Kemudian setiap parpol wajib menyampaikan laporan penggunaan dana pada akhir tahun.

Pada 2020, seluruh laporan keuangan dari parpol mendapat audit wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK. Sedangkan pada 2019, masih ada parpol yang mendapat hasil audit WTP dengan catatan.

"Partai politik semakin baik dalam mengelola bantuan keuangan dan melaporkannya sesuai kaidah akuntansi yang baik," katanya. (Dhi)-f

## Sertijab Kabid dan Koordinator SD Muhammadiyah Sokonandi



KR-Istimewa

Kabid dan koordinator SD Muhammadiyah Sokonandi yang dilantik beserta kepala sekolah dan Ketua PCM Umbulharjo.

YOGYA (KR) - Pelantikan dan serah terima jabatan (Sertijab) Kepala Bidang (Kabid) dan Koordinator SD Muhammadiyah Sokonandi masa jabatan 2021-2023, berlangsung sederhana dengan protokol kesehatan (Prokes) yang ketat, Rabu (23/6) di sekolah setempat. Sertijab seperti ini merupakan rutinitas di SD Muhammadiyah Sokonandi setiap dua tahun, dimana pergantian tim manajerial selalu bergiliran.

Hal itu disampaikan Kepala SD Muhammadiyah Sokonandi Anis Rofiah SThI Spd MSi, dalam sambutannya menjelang prosesi sertijab. Sedangkan Kabid yang dilantik meliputi, Kabid SDM dijabat Wisnu Eko Marwanto SSI Spd, Kabid Kurikulum Nurul Hidayati SSI Spd, Kabid Kesiswaan Fitri Umiyati AMD, Kabid Humas Sriningsih Wahyu Pangesti SH SPd, Kabid Keagamaan Fitri Nur'aini SPdI dan Kabid Sarpras Benny Oktyanto SPd Jas.

Pelantikan tim Kabid dan Koordinator SD Muhammadiyah Sokonandi dilakukan oleh Ketua PCM Umbulharjo, Mursih Haryono. "Sehubungan masih dalam situasi pandemi Covid-19, maka acara sertijab dilaksanakan secara sederhana," terang Kabid Humas SD Muhammadiyah Sokonandi Sriningsih Wahyu Pangesti. (\*)-f

## LIMA SIMPANG DILENGKAPI ATCS VOICE Ingatkan Pelanggar Marka Sekaligus Taat Prokes

YOGYA (KR) - Sosialisasi kepada masyarakat untuk taat protokol kesehatan (prokes) dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya memanfaatkan Area Traffic Control System (ATCS) voice. Meski fungsi utamanya untuk mengingatkan pelanggar marka namun juga sosialisasi taat prokes.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogya Agus Arif Nugroho, menyebut penggunaan ATCS voice sebenarnya sudah dilakukan sejak awal pandemi. "Kita kuatkan untuk pencegahan Covid-19. Tidak hanya ATCS yang ada suaranya melainkan juga melalui semacam *running text*," jelasnya, Rabu (23/6).

Saat ini total ada lima simpang yang sudah dilengkapi ATCS voice yakni simpang SGM, simpang Sentul, simpang Cendana, simpang Permatana, dan simpang Gondomanan. Melalui ATCS voice tersebut petugas Dinas Perhubungan dapat melihat pengendara yang melakukan pelanggaran di simpang kemudian mengingatkannya melalui pengeras suara. Pelanggaran tersebut baik melanggar marka, tidak memakai helm maupun tidak mengenakan masker. Resolusi kamera juga sudah cukup bagus karena bisa melihat nomor plat kendaraan dengan jelas.

Agus mengatakan, total ada 52 simpang di Kota Yogya. Harapannya seluruhnya mampu dilengkapi ATCS dengan pengeras suara. Hanya tahun ini belum akan ada penambahan di luar lima simpang karena anggaran difokuskan untuk penanganan Covid-19. "Kami juga koordinasi dengan DIY untuk bisa mengelola ATCS yang selama ini pengadaannya dilakukan oleh DIY. Supaya bisa terintegrasi," katanya.

Terkait dengan kewenangan, petugas Dinas Perhubungan hanya sebatas melakukan imbauan terhadap pelanggaran yang terjadi. Sedangkan untuk penindakan atau tilang sudah menjadi kewenangan pihak kepolisian. Apalagi pihak kepolisian saat ini tengah mengembangkan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Akan tetapi ATCS tersebut belum bisa diintegrasikan dengan ETLE karena perlu integrasi data serta perangkat yang digunakan. (Dhi)-f

**DPRD KOTA YOGYAKARTA**  
**SUARA WAKIL RAKYAT**  
JL. IPDA TUT HARSONO 43 YOGYAKARTA TELP. (0274) 540650

## PEMBANGUNAN BARU TUNTASKAN DED

### Hidran Kampung Harus Mudah Diakses

YOGYA (KR) - Pembangunan hidran kering di perkampungan atau hidran kampung harus mudah diakses jika sewaktu-waktu hendak digunakan. Warga yang diberi tanggungjawab memegang kunci seyogyanya bertempat tinggal di sekitar pusat kendali serta tidak memiliki kesibukan di luar rumah.

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Yogyakarta Ririk Banowati Permanasari SH, menuturkan pihaknya sempat melakukan sidak hidran kering di salah satu kampung dan didapati pemegang kunci tidak berada di tempat. "Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogya yang memegang kunci cadangan juga harus memilih satu persatu dari semua kunci hidran kering. Dari masalah teknis ini saja membutuhkan waktu untuk membuka saluran," tandas Ketua Komisi C ini.

Oleh karena itu masalah teknis tersebut seharusnya tidak terjadi jika manajemennya tersistem rapi. Hal ini karena hidran kering atau hidran kampung sangat dibutuhkan bagi wilayah yang tidak terjangkau oleh mobil pemadam kebakaran. Ririk berharap persoalan serupa tidak kembali terjadi di titik lain.

Ririk menambahkan, saat ini su-

Ririk Banowati Permanasari SH  
Ketua Fraksi Gerindra  
Ketua Komisi C



KR-Ardhi Wahdan

dan Ngadiwinatan. "Untuk pembangunan baru kami di Komisi C sudah sepakat agar menuntaskan Detail Engineering Design (DED) yang sudah disusun sejak tahun 2017 lalu. Jadi untuk penyusunan DED baru belum akan kami setuju sebelum seluruh DED yang ada diselesaikan," tandasnya.

Sesuai DED, satu hidran kering untuk kampung berdimensi kecil membutuhkan dana sekitar Rp 750 juta. Sedangkan kampung yang cukup luas bisa mencapai Rp 3 miliar. Besarnya anggaran tersebut karena harus didahului dengan membongkar infrastruktur guna menaruh jaringan pipa air. Jika DED yang sudah ada tidak segera dituntaskan, dikhawatirkan kondisi wilayah mengalami perubahan sehingga perencanaannya akan sia-sia.

Ririk juga berharap, kondisi pandemi bisa semakin membaik dan keuangan negara kembali stabil. Dengan begitu, kampung yang sudah masuk dalam DED bisa segera dibangun hidran kering. "Hidran ini sangat dibutuhkan bagi kampung yang akses jalannya sempit. Tapi kita semua juga berharap jangan sampai terjadi musibah kebakaran," jelasnya. (Dhi)-f

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**AKADEMI KOMUNITAS NEGERI SENI DAN BUDAYA YOGYAKARTA**  
Jalan Parangtritis KM 4.5, Sewon, Bantul, D.I Yogyakarta

**MENERIMA MAHASISWA BARU PROGRAM DIPLOMA SATU (D1) TA 2021/ 2022**

**PROGRAM STUDI**

- D1 KARAWITAN
- D1 KRIYA KULIT
- D1 TARI

**BIAYA KULIAH SEPENUHNYA DITANGGUNG OLEH PEMDA DIY**

**WAKTU PENDAFTARAN**

- GELOMBANG II : 02 Juni - 02 Juli 2021
- Waktu Layanan Pendaftaran: Senin - Kamis : Pukul 08.00 s.d. 14.30 WIB  
Jumat : Pukul 08.00 s.d. 13.00 WIB
- Tempat Pendaftaran : Kampus Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta Jalan Parangtritis Km.4.5, Pnggunharjo, Sewon, Bantul

**SYARAT PENDAFTARAN**

- Mempunyai minat/ bakat di bidang Seni Tari, Karawitan dan, Kriya
- KTP DIY
- SMA/ Sederajat
- Usia tidak dibatasi
- Foto copy kartu identitas
- Pas foto 3x4 background merah (4 lembar dan softcopy)
- Foto copy STTB/ Ijazah/ SKHUN yang dilegalisir

www.aknyogya.ac.id @aknbs.yogyakarta 0821-3744-7834 0817-7542-0006